

Judul : DPR: segera buat perjanjian ekstradisi dengan Singapura
Tanggal : Rabu, 10 Desember 2014
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : A5

DPR: Segera Buat Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura

[JAKARTA] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan negara-negara lain yang selama ini menjadi penampungan buronan dan koruptor dari Indonesia. Hal itu sangat penting dilakukan pemerintah agar uang Negara yang dikorupsi selama ini bisa kembali ke Indonesia.

“Korupsi di negara kita sekarang ini sudah sangat luar bisa. Ini sangat berdampak kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia sekarang ini” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam diskusi memperingati ‘Hari Anti Korupsi Sedunia – Galang Petisi Nasional Adili Grand Corruption’ bersama Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Teguh Juwarno (FPAN), dan Mutia Hafidz (Golkar) di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/12).

Setelah ada perjanjian ekstradisi, kata Fadli, maka



BERITASATU PHOTO/JOANITO DE SAOJOAO

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi damai memperingati Hari Anti Korupsi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12). ICW memperingatkan anggota legislatif untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Negara sudah bisa menangkap para korupstor kakap yang saat ini diduga banyak bermukim di Singapura. Bahkan, uang hasil jarahan dari Indonesia banyak di simpan di negeri singa itu.

Menurut Fadli Zon, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus diperkuat dengan sistem pencegahan. Artinya KPK tidak hanya mengedepank-

an pemberantasan korupsi.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf menegaskan jika dalam hal pemberantasan korupsi ini BKSAP bersama negara-negara di dunia akan menggalang dukungan untuk mengadili koruptor besar. BKSAP harus mendukung pemberantasan dan melumpuhkan serta mengadili koruptor besar. [H-14]